



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>



SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 216/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Ganjil 2025/2026 No.148/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 September 2025 dan surat permohonan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan No. 800.2.2/1001/BangSDMA/BPKSDM/2025 tanggal 26 November 2025 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Dr. Taufik, SE., MM. (NIDN :0310037303)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal	: Senin-Kamis , 1- 4 Desember 2025
Waktu	: 08.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Hotel Qin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
Tema	: “Bimtek Kajian Akademis Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 28 November 2025



Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No. 1 Telp/Fax (0511) 477 2495 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Website : www.bkpsdm.banjarbarukota.go.id Instagram @bkpsdm.bjb

Banjarbaru, 26 November 2025

Nomor : 800.2.2/1001/BangSDMA/BKPSDM/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis

Yth. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas IPWIJA

Di
JAWA BARAT

Sehubungan dengan kegiatan “Bimbingan Teknis Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG)” yang akan diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui pola penyertaan dari BKPSDM Kota Banjarbaru, dengan ini kami mengajukan permohonan narasumber sebanyak 1 (satu) orang Dosen pada Universitas IPWIJA yang membidangi tema Bimtek tersebut untuk dapat memberikan materi dan mendukung kelancaran kegiatan yang direncanakan pada :

Hari/tanggal	: Senin – Kamis, 1 s/d 4 Desember 2025
Pukul	: Disesuaikan dengan jadwal
Materi	: Kajian Akademis Peran Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan daerah
Lokasi	: Hotel Qin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Siarier Riyadi S. Sos
NIP. 196602121989101001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No. 1 Telp/Fax (0511) 477 2495 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Website : www.bkpsdm.banjarbarukota.go.id Instagram @bkpsdm.bjb

Banjarbaru, 8 Desember 2025

Nomor : 800.2.2/1004/BangSDMA/BKPSDM/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ucapan Terima Kasih

Yth. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas IPWIJA

Di
JAWA BARAT

Sebagaimana telah terlaksananya agenda kami "Bimbingan Teknis Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru" pada tanggal 1 s/d 4 Desember 2025 yang bertempat di Hotel Qin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan sesuai harapan. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dosen dari Universitas IPWIJA (Bapak Dr. Taufik, S.E., M.M. NIDN. 0310037303) yang telah menjadi Narasumber/ pematari terkait Kajian Akademis Peran Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah.

Pemaparan materi tersebut dinilai telah memberikan *insight* positif dalam peningkatan motivasi dan persepsi aparatur guna akselerasi sinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Besar harapan kami, semoga melalui kegiatan ini dapat berlanjut pada dukungan kegiatan pengembangan SDM lainnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Slamet Riyadi S. Sos
NIP. 196612121989101001

Kajian Akademis Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah

Dr. Taufik, S.E., M.M.

Disampaikan pada Kegiatan Bimbingan Teknis
Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG)
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

2025

Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



DASAR HUKUM



Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045



Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2025-2029

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PRESIDEN

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

(Berdasarkan UU No 23 TAHUN 2014)

adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

ABSOLUT

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT

WAJIB (24)

PILIHAN (8)

PELAYANAN DASAR

NON PELAYANAN DASAR

DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban & perlindungan Masyarakat
6. Sosial

URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

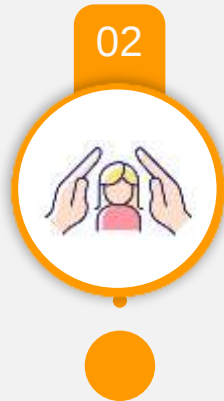
URUSAN PPPA

MERUPAKAN URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR

6 Sub Urusan Pemerintah



KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN



PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN



KUALITAS
KELUARGA



SISTEM DATA GENDER
DAN ANAK



PEMENUHAN HAK
ANAK



PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

Tujuan Pembangunan Daerah

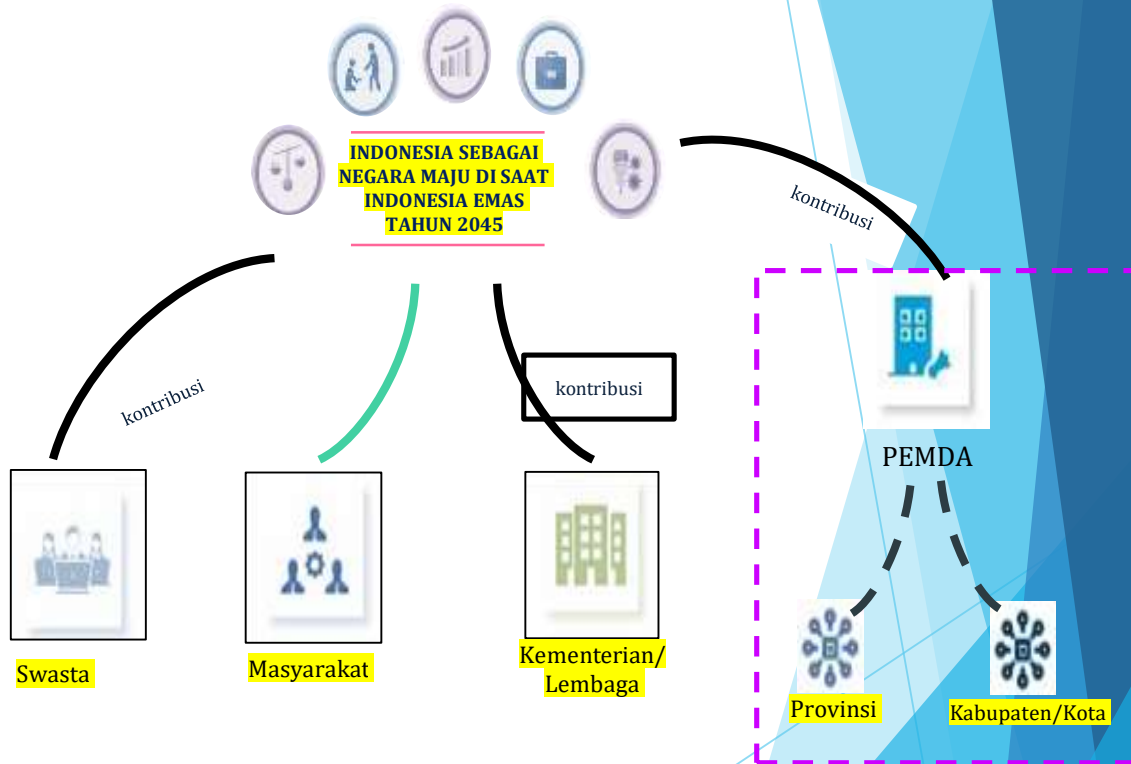
UU 23/2014

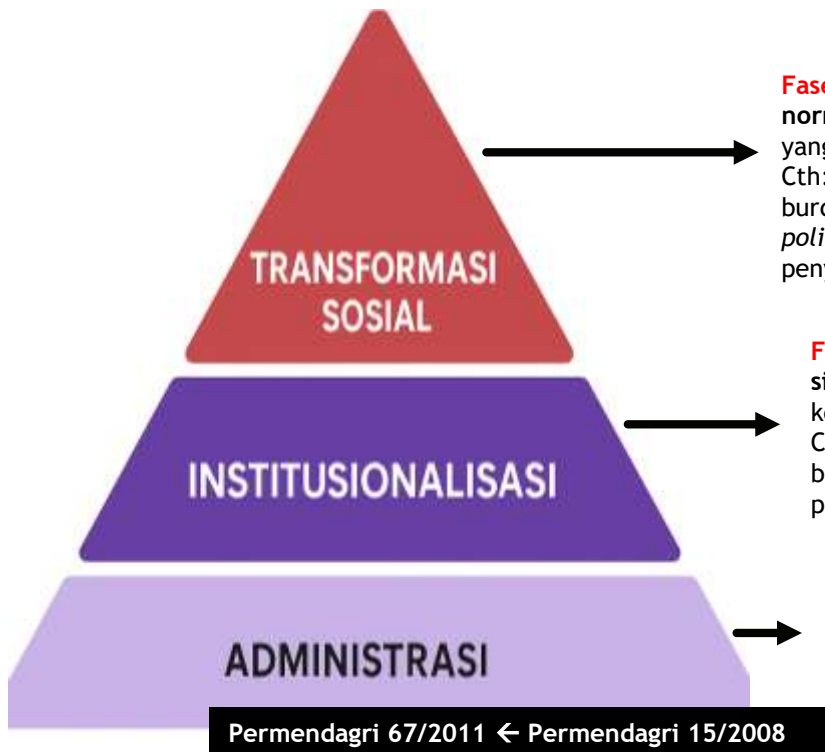
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral dari pembangunan nasional**

Pasal 258, UU 23/2014

Daerah melaksanakan pembangunan untuk **peningkatan dan pemerataan**:

1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.





Fase ketiga: PUG menghasilkan perubahan nyata dalam norma sosial, perilaku kelembagaan, dan relasi kekuasaan yang selama ini menyebabkan ketimpangan gender
Cth: Skema perlindungan sosial utk mengurangi beban double burden perempuan, Pokja PUG lintas OPD difungsikan sebagai *policy influencer* yg memberi masukan langsung dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah

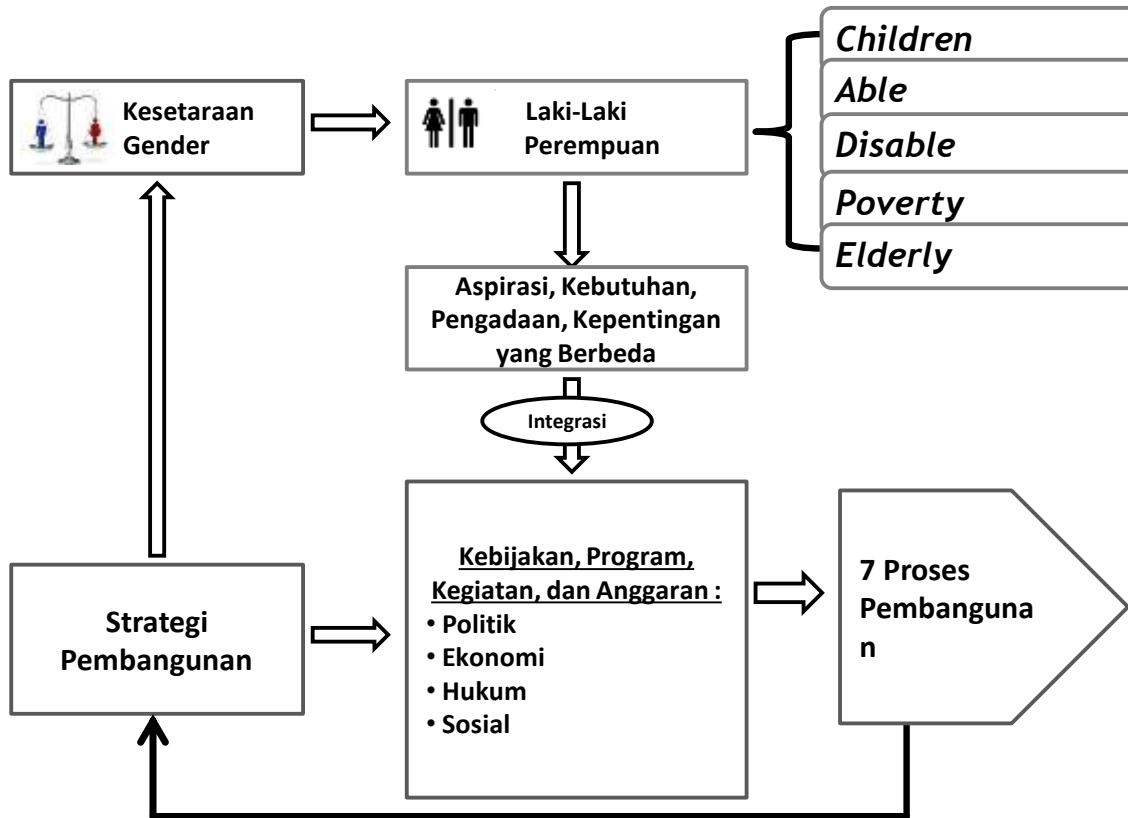
Fase kedua: PUG melekat secara sistemik dalam seluruh siklus pembangunan daerah, bagian dari proses kelembagaan rutin bukan kegiatan tambahan.
Cth: Integrasi PUG dalam SIPD, penilaian kinerja OPD berdasar indikator KG (fokus pada kebermanfaatan pengurangan ketimpangan gender)

Fase pertama: PUG hanya berfokus pada kepatuhan administratif dan pelaporan formal (administratif).
Cth: Pembentukan Pokja PUG, penyusunan GAP&GAB, laporan capaian IPG/IKG tahunan tanpa analisis mendalam.

Diadopsi dari Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results (UN Women, 2022)

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

STRATEGI PELAKSANAAN PUG



Strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

(Inpres No. 9 Tahun 2000)

Perkembangan Pembangunan Isu Perempuan, Gender dan GEDSI

- ***Women in Development***
Terjadi pada tahun 70an, perempuan diikutkan dalam pembangunan
- ***Women and Development***
Perempuan didorong untuk berkontribusi (karena memiliki potensi yang besar)
- ***Gender and Development***
Target spesifikin group nya tidak hanya perempuan dalam pembangunan namun juga laki-laki dan pembangunan
- ***Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)***
Tidak hanya perempuan dan laki-laki namun juga social inklusi (lansia, anak dan difabel)

Empat Aspek Kesenjangan Gender

Akses

Peluang bagi LK & PR untuk menjangkau/memperoleh sumber daya pembangunan

Kontrol

Kemampuan/kewenangan/ kekuatan LK & PR untuk mengambil keputusan atau terhadap sumberdaya pembangunan

Partisipasi

Keikutsertaan LK & PR dalam proses/ kegiatan pembangunan atau dalam proses pengambilan keputusan

Manfaat

Hasil guna dari proses pembangunan yang dirasakan dan dinikmati LK&PR

Integrasi Penyelenggaraan PUG pada Keseluruhan Proses Pembangunan

**2000-2021
(PUG)**

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
(sebagian)
4. Evaluasi
(kelembagaan)

**2022-dst
Penyelenggaraan PUG
(7 proses)**

1. Perencanaan (revisi)
2. Penganggaran (revisi)
3. Pelaksanaan (seluruh)
 - Pusat
 - Provinsi
 - Kab/Kota
4. Pemantauan
5. Evaluasi (seluruh)
6. Pengawasan
7. Pelaporan

Penggerak dan Pelaksana PUG

PUSAT

K/L Penggerak



KemenkoPMK



KemenPPPA



KemenPPN/Bappenas



Kemenkeu



Kemendagri



KemenDesa
PDDT



BPS



BPKP



KemenPAN-
RB

K/L Pelaksana

Seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAERAH

PD Penggerak

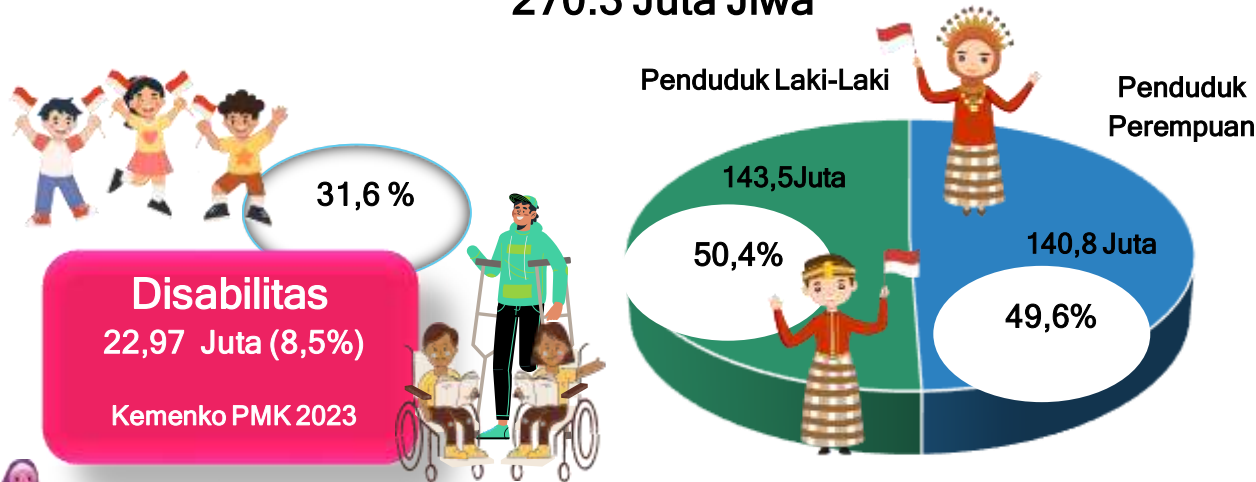
- sekretariat daerah;
- badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota
- badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota;
- dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota;
- dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan, pemberdayaan masyarakat, dan desa di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan
- inspektorat daerah

PD Pelaksana

- Seluruh perangkat daerah
- perangkat daerah penggerak

Potret Perempuan, Anak, dan Disabilitas sebagai Sumber Daya Potensial dalam Pembangunan

Jumlah Penduduk Indonesia
270.3 Juta Jiwa



Sumber: Sensus Penduduk Indonesia, 2025

Arah kebijakan pembangunan 2025-2029 berfokus kepada peningkatan kualitas SDM



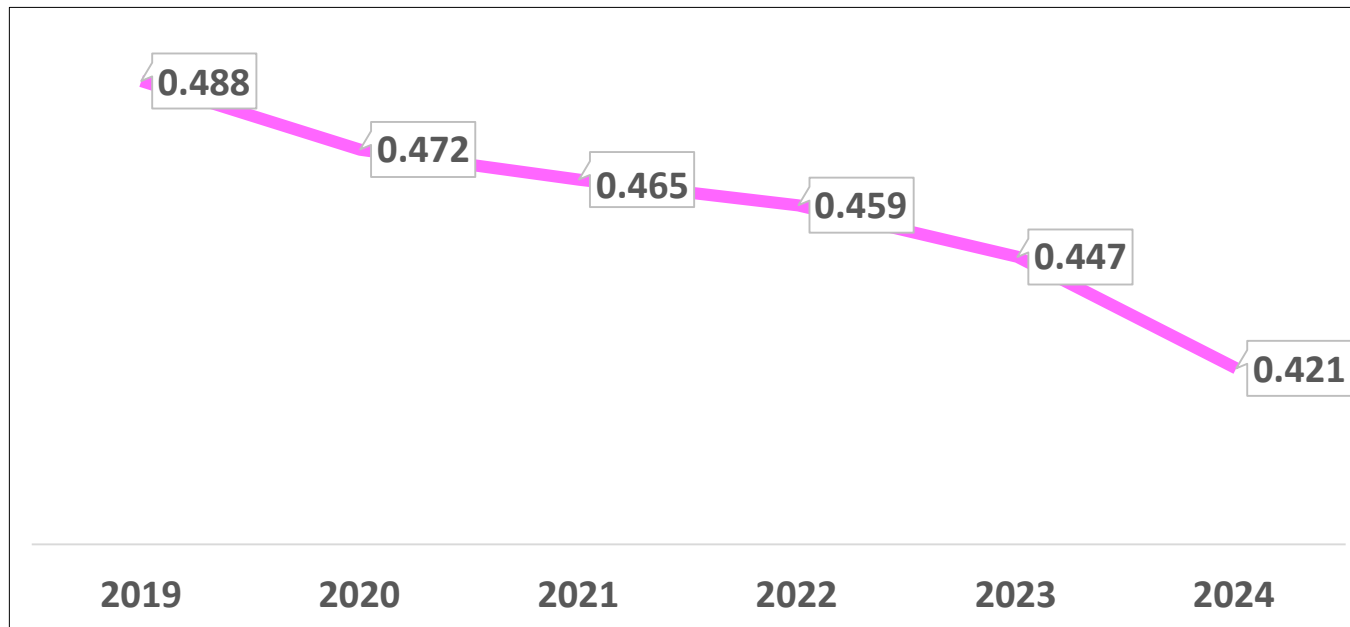
Untuk mencapai SDG's 2030
Indonesia Emas 2045

SDM yang Berdaya Saing, Inovatif Dan Kreatif serta Berani untuk melakukan perubahan mengikuti perkembangan jaman dan dinamika yang terjadi dalam setiap tahapan kehidupan menjadi bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan



Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Tahun 2019-2024



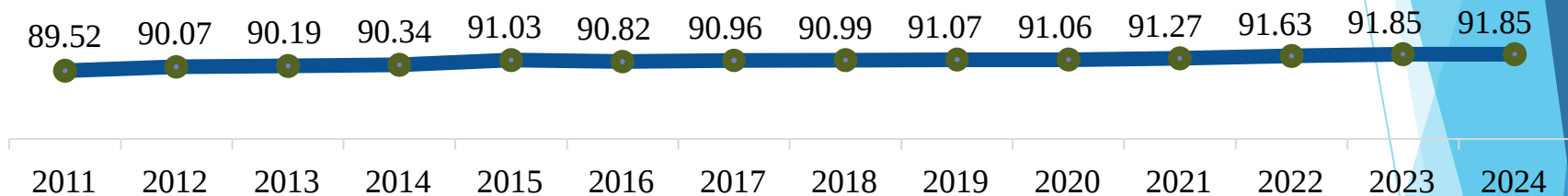
Diukur dengan:

- KESEHATAN: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran) (SDG 3.1) KB/PERKAWINAN
- ANAK: Angka Kelahiran Remaja (kelahiran per 1000 remaja usia 15-19 th) (SDG 3.7) POLITIK: Partisipasi
- Perempuan dlm Parlemen (SDG 5.5)
- PENDIDIKAN: Penduduk
- dengan Pendidikan Menengah (L/P usia >25th) (SDG 4.4)
- KETENAGAKERJAAN: TPAK
- (L/P)

Sumber: BPS, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tahun 2011-2024



Diukur dari Rasio IPM L/IPM P:

1. KESEHATAN

- Angka Harapan Hidup (SDG 3)

2. PENDIDIKAN

- Harapan Lama Sekolah (SDG 4.3)
- Rata2 Lama Sekolah (SDG 4.4)

3. EKONOMI

- Pengeluaran Per Kapita (SDG 8.5)

Sumber: BPS, 2025

Integrasi Perspektif Gender dalam RPJPN 2025-2045

01



Sebagai Kaidah Pelaksanaan

Strategi PUGIS menjadi bagian dari prinsip THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)

02



Sebagai Tujuan Pembangunan

IE 14: "Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif"

03



Sebagai Bagian dari Kebijakan Sektoral

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial mewarnai arah kebijakan sektoral

04



Terintegrasi dalam Kebijakan Kewilayahan

Spesifik Isu Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial dihighlight dalam kebijakan kewilayahan

05



Sebagai Strategis Komunikasi

Strategi Komunikasi disusun sesuai segmentasi sasaran (K/L/D, anak, pemuda, PD, masyarakat, dll)

Komitmen Internasional

- UU 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai CEDAW
- Beijing Platform for Action (BPfA)
- UU 11/2005: Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- UU 12/2005: Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
- UU 19/2011: Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities
- Visi ASEAN Community, SDGs
- G20 Empower

Kebijakan/Regulasi Nasional

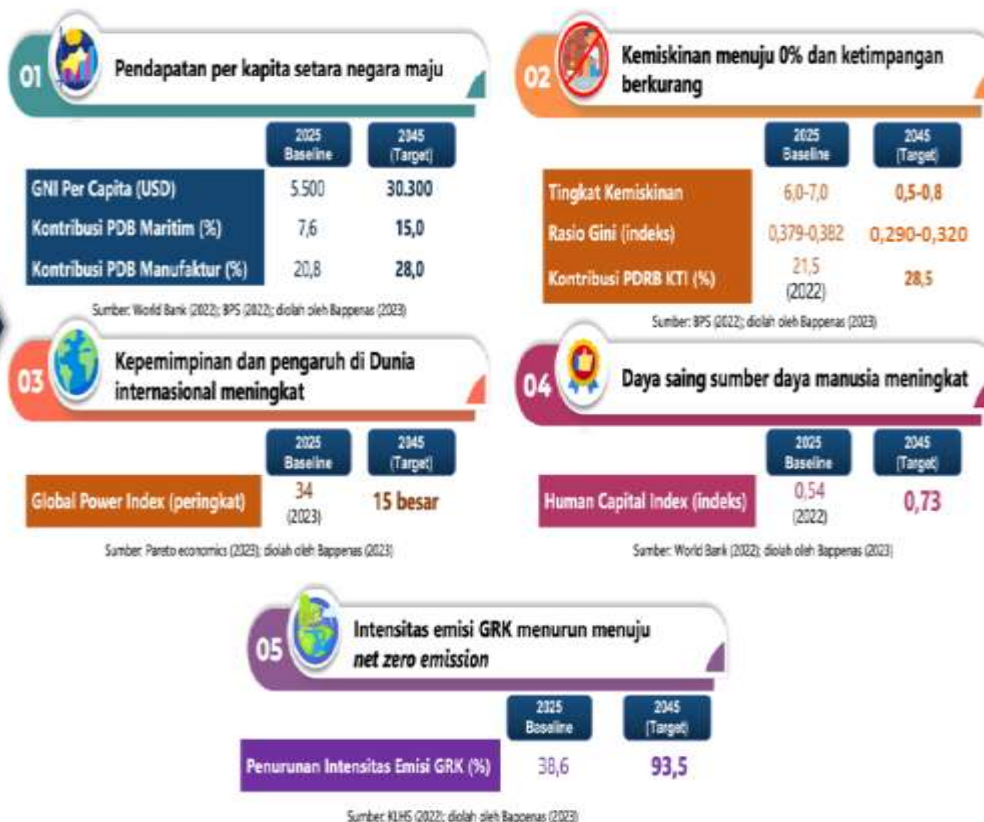
- UUD 1945
- Inpres No. 9/2000: PUG dalam Pembangunan Nasional
- UU 23/2004: Kekerasan dalam Rumah Tangga
- UU 17/2007: RPJPN 2005-2025
- UU 39/1999: Hak Azasi Manusia
- UU 6/2016: Desa
- UU 12/2022: Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan turunannya
- UU 4/2024: Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu HPK
- Perpres RPJMN dan RKP
- Perpres 111/2022: pelaksanaan TPB/SDGs
- Permenkeu 62/2023: Penganggaran K/L (Gender Action Budget)

Kebijakan/Regulasi Daerah

- Inpres No. 9/2000 PUG dalam Pembangunan Nasional (dan Daerah)
- UU 23/2014: UU Pemda
- PermenPPPA 3/2023: Urusan Pemerintahan Konkuren PPPA
- Permendagri 67/2011: Pedum Pelaksanaan PUG di Daerah
- Permendagri 90/2019: Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pmutakhirannya
- Permendagri Penyusunan RKPd (revisi tahunan)
- Permendagri Penyusunan APBD (revisi tahunan)

5 Sasaran Utama RPJPN 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045



RPJPN → 17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS

TRANSFORMASI INDONESIA

Transformasi Sosial

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Transformasi Ekonomi

- IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi Tata Kelola

- IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

LANDASAN TRANSFORMASI

Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi

- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
- IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

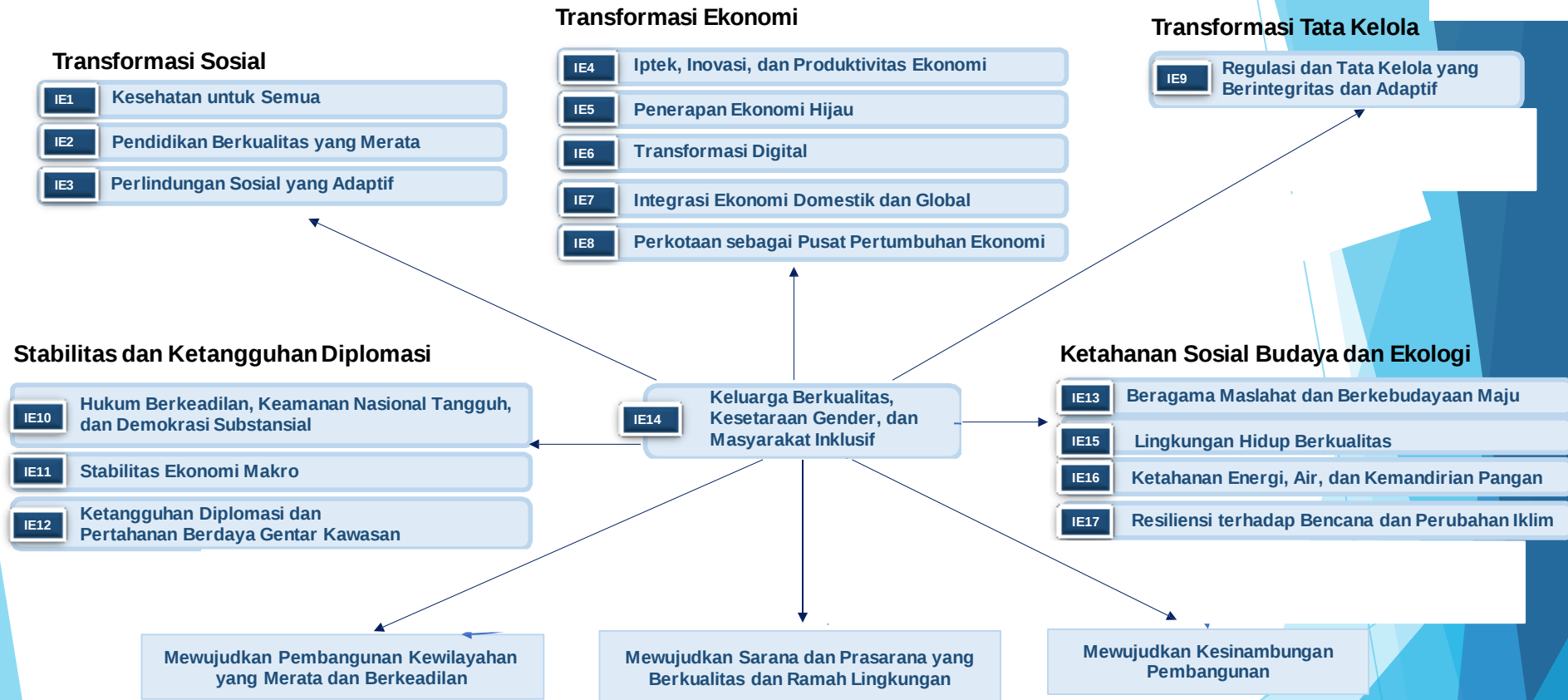
- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

- Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan

Sumber: Presentasi Bappenas, 2024

INTEGRASI GENDER DI 17 TUJUAN PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS



Sumber: Presentasi Bappenas, 2024

PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2025 - 2029

5 Pengarusutamaan

dalam RPJMN Tahun 2025-2029



Gender dan Inklusi Sosial



Sustainable Development Goals
(SDGs)



Transformasi Digital



Pembangunan Rendah Karbon



Pembangunan Berketahanan
Iklim

Esensi

dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

Source : RPJMN 2025-2029

Kesetaraan Gender dan Penguatan Peran Perempuan menjadi salah satu fokus Presiden dan Wakil Presiden

Asta Cita

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM**
2. Memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. **Memperkuat Pembangunan SDM, sains teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan buday,, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur

[Asta Cita 1 – Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)]

Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, **berperspektif gender**, serta **memperioritaskan upaya pemberdayaan Perempuan** dan perlindungan anak

Memperkuat **perlindungan perempuan** dan anak serta memperkuat penegakan hukum.

[Asta Cita 4 – Pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas]

Menguatkan **Peran Perempuan**, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya **Pemberdayaan Perempuan** dan Perlindungan Anak.



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga;
2. Para Gubernur; dan
3. Para Bupati/Wali Kota,
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL

SE Menteri PPPA Nomor 1 tahun 2024 tentang Percepatan Penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Nasional mengamankan percepatan penyelenggaraan PUG di Kementerian dan/Lembaga dan Pemerintah Daerah **melalui 7 (tujuh) proses pembangunan** yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan, sehingga penyelenggaraan PUG dapat lebih **berdampak langsung melalui program dan kebijakan** kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.

Revitalisasi PUG dalam peningkatan Sinergi Pembangunan Daerah

PELAKSANAAN REVITALISASI PUG

- Pengembangan instrumen
- Revisi/updating Kebijakan Pusat dan Daerah
- Peningkatan Kapasitas SDM Pusat dan Daerah

INSTRUMEN

- Dikembangkan instrumen analisis gender di 7 proses Pembangunan
- Instrumen analisis gender di perencanaan dan penganggaran :
 - a. Semula : GAP 9 Langkah (diterapkan di level RO/Subkegiatan)
 - b. Menjadi: analisis gender di level sektor (GAP 4 Langkah atau analisis lainnya) dan kriteria minimal responsif gender di level RO/Subkegiatan
- Dalam proses menguji analisis gender di level RO/Subkegiatan. Saat ini ada beberapa opsi. fOKUS: user friendly/memudahkan bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun GAB (KAK Responsif Gender)

PERBEDAAN ANALISIS GENDER

SEMULA (sebelum revitalisasi PUG)	MENJADI (revitalisasi PUG)
Analisis gender dilakukan di level sub kegiatan (tahunan)	Analisis gender dilakukan di level sektor dan level sub kegiatan (menggunakan pendekatan Kerangka Kerja Logis)
Satu analisis gender untuk satu sub kegiatan (tahunan)	• Satu analisis gender di level sektor menghasilkan rencana aksi yang akan digunakan untuk banyak sub kegiatan, di banyak PD. • Rencana aksi diintegrasikan di dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) • Jika kehilangan momentum integrasi di RPJMD dan Renstra PD, maka tetap dilakukan analisis gender di level sektor dan sub kegiatan
Instrumen analisis : GAP 9 Langkah, GBS, ToR	Instrumen analisis : Analisis gender level sektor : GAP 4 Langkah/Proba/analisis gender lainnya
Membutuhkan sumber daya besar jika analisis dilakukan di banyak sub kegiatan (tahunan)	Dibutuhkan sumber daya sedikit jika analisis dilakukan di banyak sub kegiatan (diharapkan akan mengurangi beban administrative PD)
Sub kegiatan responsive gender di proses perencanaan dan penganggaran	Sub kegiatan responsive gender di 7 proses pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan)

Regulasi Pusat (sudah di-update dengan substansi revitalisasi PUG)

- SE Menteri PPPA Nomor 1 tahun 2024
- Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029
- Perpres RKP 2026
- Surat Bersama Pagu Indikatif
- Surat Bersama Pagu Anggaran
- Nota Keuangan APBN 2026
- PMK No 62/2023 dan revisinya PMK No 107/2024

Saat ini dalam proses penyusunan Pedoman PUG di Proses Perencanaan dan Penganggaran tahunan dan Materi Bimtek

Regulasi Daerah

Regulasi yang memuat substansi revitalisasi PUG:

- SE Menteri PPPA No 1 Tahun 2024
- Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Regulasi yang dalam proses revisi/perlu direvisi

- Permendagri No 67/2011 (dalam proses revisi)
- Permendagri Pedum Penyusunan APBD (targetnya masuk di Pedum utk APBD 2026, namun belum tercapai, sehingga baru akan ada di Pedum utk APBD 2027)
- Permenpppa No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG untuk Pemda

Sikap di Masa Transisi

- Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota menentukan sikap berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PD Penggerak, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah
Level Strategis - Nasional & Daerah

Urgensi Pembangunan Inklusif

- ▶ Ketimpangan gender mempengaruhi kualitas pembangunan.
- ▶ IPG & IDG sebagai indikator strategis.
- ▶ PUG sebagai mandat nasional.

Konsep Dasar Gender

- ▶ Konstruksi sosial peran gender.
- ▶ Implikasi dalam kebijakan publik.

Kerangka Teoritis

- ▶ Gender and Development (GAD).
- ▶ Teori keadilan sosial (equity).
- ▶ Intersectionality approach.

Definisi PUG

- ▶ Strategi integrasi perspektif gender.
- ▶ Dilakukan pada tahap perencanaan hingga evaluasi.
- ▶ Tujuan: kesetaraan & keadilan gender.

Landasan Hukum Nasional

- ▶ Inpres No. 9 Tahun 2000.
- ▶ Permendagri No. 67 Tahun 2011.
- ▶ RPJPN 2005-2025.
- ▶ RPJMN 2020-2024.

PUG dalam Sistem Perencanaan Nasional

- ▶ Integrasi dalam RPJPN & RPJMN.
- ▶ Sinkronisasi pusat-daerah.
- ▶ Pendekatan money follows program.

PUG dalam RPJMD

- ▶ Visi-misi kepala daerah responsif gender.
- ▶ Indikator gender dalam tujuan & sasaran.
- ▶ Integrasi dalam strategi daerah.

Renstra OPD Responsif Gender

- ▶ Analisis GAP.
- ▶ Penetapan indikator gender.
- ▶ Output & outcome responsif gender.

PPRG (Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender)

- ▶ Analisis kesenjangan gender.
- ▶ Penyusunan GBS.
- ▶ Integrasi dalam APBD.

Gender Budget Statement (GBS)

- ▶ Dokumen analisis gender program.
- ▶ Menjamin belanja daerah efektif.
- ▶ Mendorong akuntabilitas.

Data Terpilah Gender

- ▶ Dasar analisis kebijakan.
- ▶ Integrasi dalam e-planning.
- ▶ Open data gender daerah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- ▶ Partisipasi politik perempuan.
- ▶ Keterwakilan dalam pengambilan keputusan.

Capaian & Tantangan Nasional

- ▶ Perbaiki IPG nasional.
- ▶ Kesenjangan wilayah masih ada.
- ▶ Kapasitas daerah belum merata.

Model Sinergi Quadruple Helix

- ▶ Pemerintah.
- ▶ Akademisi.
- ▶ Dunia usaha.
- ▶ Masyarakat sipil.

Peran Kepala Daerah

- ▶ Political will.
- ▶ Integrasi dalam kebijakan strategis.
- ▶ Monitoring kinerja OPD.

Penguatan Pokja PUG

- ▶ Koordinasi lintas OPD.
- ▶ Pendampingan teknis.
- ▶ Evaluasi berkala.

Digitalisasi PUG

- ▶ Dashboard IPG/IDG.
- ▶ Integrasi e-budgeting.
- ▶ Sistem monitoring real time.

Strategi Capacity Building

- ▶ Pelatihan GAP & GBS.
- ▶ Sertifikasi perencana gender.
- ▶ Kolaborasi perguruan tinggi.

Audit Gender

- ▶ Evaluasi dampak kebijakan.
- ▶ Mengukur efektivitas belanja.
- ▶ Rekomendasi perbaikan.

Best Practice Daerah

- ▶ Daerah dengan Perda PUG.
- ▶ Inovasi gender budgeting.
- ▶ Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya.

Dampak Ekonomi PUG

- ▶ Produktivitas meningkat.
- ▶ Pengurangan kemiskinan perempuan.
- ▶ Daya saing daerah meningkat.

Dampak Sosial PUG

- ▶ Penurunan kekerasan berbasis gender.
- ▶ Peningkatan partisipasi pendidikan.
- ▶ Kesehatan ibu & anak lebih baik.

SDGs Goal 5

- ▶ Achieve gender equality.
- ▶ Empower all women and girls.
- ▶ Integrasi dalam target daerah.

Strategi Akselerasi 2025-2030

- ▶ Penguatan regulasi daerah.
- ▶ Insentif fiskal responsif gender.
- ▶ Kolaborasi lintas sektor.

Risiko Jika PUG Tidak Diimplementasikan

- ▶ Inefisiensi anggaran.
- ▶ Kesenjangan sosial meningkat.
- ▶ Pertumbuhan tidak inklusif.

Rekomendasi Kebijakan Strategis

- ▶ Integrasi penuh dalam RPJMD.
- ▶ Penguatan monitoring berbasis data.
- ▶ Komitmen pimpinan daerah.

Roadmap Implementasi Daerah

- ▶ Tahap perencanaan.
- ▶ Tahap penganggaran.
- ▶ Tahap evaluasi.

Kesimpulan

- ▶ PUG adalah mandat konstitusional.
- ▶ Sinergi mempercepat pembangunan berkeadilan.
- ▶ Kepemimpinan menjadi faktor kunci.

TERIMA KASIH



FOTO KEGIATAN



